

*Kuliah
Ke-1*

**KONSEP:
HUKUM PERUSAHAAN,
HUKUM EKONOMI,
HUKUM BISNIS**

By Sunaryo

A. HUKUM PERUSAHAAN

1. Sejarah Istilah

- a. Pengganti istilah “Hukum Dagang” (Belanda: *Recht van Koophandel*), konsepnya terlalu sempit;
- b. Istilah Hk Dagang dikenal dlm KUHD dan digunakan sbg nama matakuliah pada Fak Hukum di Indonesia sejak jaman Belanda sampai saat ini;
- c. Hk Dagang: aturan yang mengatur kegiatan dagang yg dilakukan perusahaan;
- d. Dagang adl: salah satu kgtn ekonomi berupa membeli barang unt dijual lagi atau disewa (diatur dlm Pasal 2 KUHD)

- e. Hk Perusahaan (Bhs Belanda: *Bedjrivenrecht*) adl aturan kegiatan ekonomi yg dilakukan oleh perusahaan;
- f. Jadi Hk Perusahaan lebih luas lingkup bidang pengaturan dari Hk Dagang dan sesuai dgn perkembangan kegiatan ekonomi; Keg ekonomi meliputi: dagang, industri, jasa, & pembiayaan.

2. Penggunaan Istilah

Saat ini, sebutan untuk mata kuliah dasar keahlian pada Fak Hukum di Indonesia adl: Hk Dagang/ Hk Perusahaan.

3. Pengaturan Substansi

- Diatur dlm KUHD, UURI, dan sumber hk lain: PP, Keppres, perjanjian, yurisprudensi
- Lingkup bidang hukumnya meliputi:
 - a. Hk Bdn Usaha (*corporate law*) dan
 - b. Hk Bisnis/kegiatan usaha (*business law*).

4. Lingkup aspek hukum:

- a. Perdata, al: kontrak, wanprestasi, ganti rugi.
- b. Pidana, al: penyelundupan, pemalsuan dokumen, penggunaan merek tanpa izin
- c. Administrasi Negara, al: izin usaha, pendaftaran perusahaan, pemeliharaan dokumen, denda.

5. Sanksi pelanggaran:

- a. aspek pidana → penjara, denda**
- b. aspek perdata → ganti kerugian**
- c. aspek administratif → pencabutan izin usaha, denda**

B. HUKUM EKONOMI

1. Sejarah Istilah

- Istilah Hk Ekonomi terjemahan: *Economic Law* yg banyak digunakan di Amerika Serikat.
- Hk Ekonomi adl: hk kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh perusahaan.

2. Penggunaan Istilah

- Istilah Hk Ekonomi digunakan utk sebutan subprogram studi minat (konsentrasi) di bagian Hk Keperdataan pada FH di seluruh Indonesia.
- Di Fakultas Ekonomi nama mata kuliah wajib.

3. Pengaturan Substansi

- Hukum Ekonomi adalah padanan Hukum Perusahaan.
- Pengaturan substansi Hk Perusahaan juga adl substansi Hk Ekonomi.
- Lingkup aspek hukum, sanksi pelanggaran adalah sama dengan Hukum Perusahaan.

C. *Istilah Lain*: HUKUM BISNIS

- Terjemahan dari istilah *Business Law*, banyak digunakan di Inggris dan negara-negara Anglo Saxon berbasis *Common Law System*.
- Konsep *Business Law* di Inggris mengatur bdn usaha dan kgtn usaha serta harus terdaftar.
- Jadi, setara juga dg Hk Perusahaan di Indonesia yg mengatur bdn usaha dan kgtn usaha.
- Ketiga istilah: Hk Ekonomi, Hk Bisnis, dan Hk Perusahaan digunakan di Indonesia.

D. ASAS HK PERUSAHAAN

1. Asas Keteraturan

- Diatur dengan undang-undang
- didasari perjanjian atau kontrak

2. Asas Bentuk Hukum

Setiap perusahaan memiliki bentuk hukum: badan usaha berbentuk BH atau non BH yg menjalankan kgtn usaha di Indonesia

3. Asas Pembukuan

Stp kekayaan dan kgtn usaha dibuktikan dg dokumen dan dicatat dlm pembukuan serta disimpan, dipelihara oleh perusahaan.

4. Asas Legalitas Perusahaan

Setiap kgtn usaha wajib memperoleh izin dr instansi yg berwenang, dan terdaftar dlm Daftar Perusahaan.

5. Asas Persaingan: scr sehat, tdk melakukan monopoli

6. Asas *Profit Oriented*

Perusahaan mencari untung scr jujur, memperhatikan kptgn umum, lingkungan yg sehat.

7. Asas Kemanusiaan

Tersedianya lapangan kerja, sumber pendapatan yang layak dengan perlakuan manusiawi, menghargai HAM, dan perlindungan keselamatan kerja.

8. Asas ilmu dan teknologi

Perusahaan adalah wadah alih ilmu dan teknologi, dan wadah pengembangan SDM.



SELESAI

TERIMA KASIH